

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN
TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI KOTA BATU (Periode 2012
- 2016)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**FITA NURUL FARIDA
NIM. 135030401111069**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019

MOTTO

Yakin, Optimis, berfikir positif, dan Berdoa

Lakukanlah sekarang. Terkadang “nanti” bisa jadi “tak pernah”.

(Anonim)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al Insyirah 5 - 6)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Batu (periode 2012-2016)

Disusun oleh : Fita Nurul Farida

NIM : 135030101111069

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Perpajakan



Malang, 1 Juli 2019

Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kadarisman', is written over the watermark. The signature is fluid and cursive.

Dr. Kadarisman Hidayat M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplak, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 05 Juli 2019



Nama : Fita Nurul Farida
NIM : 135030401111069



RINGKASAN

Fita Nurul Farida, 2019. **Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Batu (Periode 2012-2016)** Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si., 89 Halaman
+ xiv

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen wajib dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sumber Penerimaan pajak daerah berasal dari beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat inflasi dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah.

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Batu (batukota.bps.go.id) dan website resmi dari Badan Pusat Statistik Kota Malang (malangkota.bps.go.id). Data yang digunakan merupakan data time series selama periode 2012 – 2016 atau sama dengan 5 tahun. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil uji t penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah Kota Batu. Sedangkan untuk Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Produk Domesti Regional Bruto , Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak Daerah.

SUMMARY

Fita Nurul Farida, 2019. **The Effect of Population, Gross Regional Domestic Product , and Inflation Rate on Regional Revenue in Batu City (2012-2016 Period)** Dr. Kadarisman Hidayat, M.Sc ., 89 Pages + xiv

Regional tax revenues are a mandatory component of regional revenue sources (PAD). Source Local tax revenue comes from several factors that influence it including population, gross regional domestic product (GDP) and inflation rate. This research aims to find out the description of population, gross regional domestic product (GDP), inflation rate and the effect on regional tax revenues.

This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The data used is sourced from secondary data obtained through the official website of the Batu City Central Bureau of Statistics (batukota.bps.go.id) and the official website of the Malang City Central Bureau of Statistics (malangkota.bps.go.id). The data used is time series data during the period of 2012-2016 or equal to 5 years. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis.

Based on the results of the t-test this study can be concluded that the variable Total Population and Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive and significant effect on the Tax Revenue of the Batu City area. Whereas for Tingkat Inflation does not affect the Regional Tax Revenue of Batu City.

Keywords : Population, Gross Regional Domesti Product, Inflation Rate, Regional Tax Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Batu (Periode 2012-2016) ”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir kolektif yang menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Saparilla Warokinarsih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpajakan
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/ Ibu Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kelancaran dan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, sebagai tempat yang nyaman dan juga menyediakan literatur-literatur yang dibutuhkan penulis selama pengerjaan skripsi ini
7. Keluarga saya tercinta, bapak Kusman dan Ibu Astikah, kakak saya Khoirul Rozikin yang selalu memberikan do'a, semangat serta dorongan yang bagi penulis.
8. Sahabat yang selalu ada setiap saya butuhkan Vivi elvani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan siap sedia mengantarkan kemana saja.
9. Sahabat ciwi-ciwiku Lucia Dwi, Wirda Ainur R dan Astrie Situmorang yang selalu memberikan semangat tiada henti. Semoga kita semua sukses dan berbahagia selalu.
10. Sahabat saya Laili Wulansari, Hikmatul Fadillah, Yustika Srisujarwati, Endang Praptiningtias Dian Novarida Dan Lutfi Nurlaili, yang selalu memberiku semangat, membantu, menemani, mendengarkan curhatan saya dan dorongan untuk selalu kuat.
11. Dan seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.

Malang, 05 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

| | |
|---|-------------|
| MOTTO | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| RINGKASAN | v |
| SUMMARY | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| LAMPIRAN..... | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Tinjauan Empiris | 13 |
| Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Tinjauan Teoritis | 15 |
| 1. Teori Makroekonomi..... | 16 |
| 2. Teori Keynes..... | 17 |
| 3. Otonomi Daerah | 18 |
| 4. Pajak | 19 |
| 5. Pajak Daerah..... | 22 |
| 6. Jumlah Penduduk..... | 26 |
| 7. PDRB | 29 |
| 8. Inflasi | 33 |
| C. Kerangka Konseptual..... | 36 |
| D. Pengembangan Hipotesis | 38 |



BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |
| C. Definisi Operasional Variabel | 45 |
| D. Konsep, Variabel, Indikator, dan Item | 47 |
| E. Populasi dan sampel | 48 |
| 1. Populasi | 48 |
| 2. Sampel | 48 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 49 |
| 1. Jenis dan Sumber data | 49 |
| 2. Metode Pengumpulan data | 50 |
| G. Teknik Analisa Data | 51 |
| 1. Analisis Statistik Deskriptif..... | 51 |
| 2. Uji Asumsi klasik | 52 |
| 3. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 54 |
| 4. Uji Hipotesis | 55 |
| a. Koefisien Determinasi (R^2)..... | 55 |
| b. Uji T..... | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 57 |
| B. Penyajian Data | 58 |
| 1. Analisis Statistik Deskriptif..... | 59 |
| a. Jumlah Penduduk..... | 59 |
| b. PDRB..... | 60 |
| c. Tingkat Inflasi..... | 61 |
| 2. Uji Asumsi klasik | 62 |
| a. Uji Normalitas | 62 |
| b. Uji Heterokedastisitas | 63 |
| c. Uji Multikolonieritas | 64 |
| d. Uji Autokorelasi..... | 66 |
| 3. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 66 |
| 4. Uji Hipotesis | 69 |
| a. Analisis Koefisien Determinasi (R^2) | 69 |
| b. Uji T..... | 70 |
| 5. Pembahasan | 71 |

BAB V PENUTUP

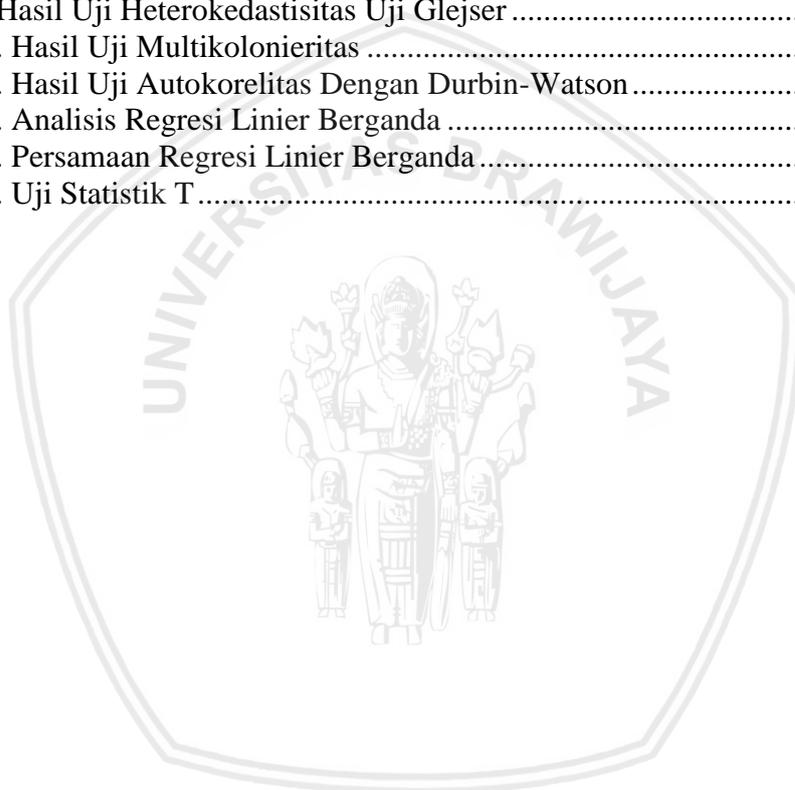
| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA79

DAFTAR TABEL

no

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Realisai Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2016..... | 2 |
| Tabel 2. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Batu Tahun 2012-2016 | 4 |
| Tabel 3. Penelitian Terdahulu | 11 |
| Tabel 4. Konsep, Variabel, Indikator, dan Item..... | 47 |
| Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Batu tahun 2012-2016 | 59 |
| Tabel 6. PDRB Kota Batu Tahun 2012-2016 | 60 |
| Tabel 7. Tingkat Inflasi Tahun 2012-2016 | 61 |
| Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov..... | 63 |
| Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas Uji Glejser | 64 |
| Tabel 10. Hasil Uji Multikolonieritas | 65 |
| Tabel 11. Hasil Uji Autokorelitas Dengan Durbin-Watson..... | 66 |
| Tabel 12. Analisis Regresi Linier Berganda | 67 |
| Tabel 13. Persamaan Regresi Linier Berganda..... | 67 |
| Tabel 14. Uji Statistik T..... | 70 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|------------------------|----|
| Gambar 1. | Model Konseptual | 36 |
| Gambar 2. | Model Hipotesis | 42 |
| Gambar 3. | Peta Kota Batu..... | 58 |



DAFTAR IAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Variabel X | 79 |
| Lampiran 2. Variabel Y | 81 |
| Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas grafik <i>Normal Probability Plot</i> | 82 |
| Lampiran 4. Hasil Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov | 83 |
| Lampiran 5. Hasil Uji Heterokedastisitas | 83 |
| Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas | 84 |
| Lampiran 7. Hasil Uji Multikoliniertas..... | 84 |
| Lampiran 8. Hasil Uji Autokorelasi..... | 85 |
| Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda | 85 |
| Lampiran 10. Hasil Koefisien Determinasi..... | 86 |
| Lampiran 11. Hasil Statistik T | 86 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi negara maka semakin sejahtera masyarakat. Meskipun demikian, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu menggambarkan kemakmuran masyarakatnya, karena pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan dari luarnya tapi belum menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut didistribusikan secara merata dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Desentralisasi telah menjadi paradigma baru dalam sejarah perekonomian sejak dasawarsa 1970-an setelah gagalnya perencanaan secara terpusat (Kuncoro, 2014). Begitupun Indonesia mulai menerapkan desentralisasi yang berupa otonomi daerah.

Menurut undang-undang No. 12 tahun 2008 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah dicanangkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001, dimana sejak saat itu banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural (Kuncoro, 2014). Pelaksanaan otonomi daerah selain menjadi landasan hukum, otonomi daerah juga implementasi untuk memberdayakan dan mengembangkan daerahnya secara merata, luas, nyata, tanggung jawab dan menggali lebih dalam sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerahnya masing-masing.

Dilaksanakannya otonomi daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik, keadilan nasional, mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat yang lebih demokrasi dan memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Untuk menjalankan program otonomi daerah yang diharapkan, pemerintah harus selalu memantau Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan sumber penerimaan keuangan asli daerah yang penting untuk penyalurkan program tersebut. Dengan tinggi rendahnya PAD suatu daerah maka akan dapat berpengaruh pada keberhasilan otonomi daerah. Selain itu dengan PAD otonomi daerah akan berjalan secara optimal.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 PAD merupakan pendapatan yang di peroleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber keuangan terbesar PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satunya adalah pajak daerah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2016

| Jenis Pendapatan | Tahun 2016 |
|---|------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| Pajak Daerah | 88.757.389.919 |
| Retribusi Daerah | 5.855.560.777 |
| Hasil Perusahaan Milik daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.152.462.133 |
| Lain-lain PAD yang sah | 12.767.575.091 |
| Jumlah | 109.532.987.918 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu (diolah oleh penulis,2019)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sumber penerimaan PAD yang terbesar adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar di banding jenis PAD lainnya. Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan

pengertian pajak pada umumnya yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Untuk meningkatkan PAD, banyak daerah yang memikirkan bagaimana meningkatkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru (Darwin, 2010). Itulah yang nantinya akan di jadikan sebagai pembiayaan atau penyediaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga banyak daerah yang memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

Oleh sebab itu, pemungutan pajak daerah secara intensif dan efektif diharapkan mampu menciptakan objek-objek baru pajak daerah untuk memaksimalkan dan menggali potensi dan kekuatan lokal terhadap penerimaan pajak daerah. Potensi dan kekuatan lokal masing-masing daerah cenderung berbeda. Khusaini (2006) menyatakan bahwa peranan pajak salah satu unsur PAD dan dalam pembiayaan daerah bervariasi terjadi karena adanya perbedaan cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomiannya. Perekonomian daerah yang stabil akan berpengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakatnya sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Pelimpahan yang bersifat otonom bagi setiap daerah yang terkait pemungutan pajak berbeda-beda macamnya. Jawa Timur merupakan Salah satu provinsi yang maju di Indonesia dan dinilai sebagai provinsi dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang baik karena adanya kegiatan produksi barang dan jasa. Dari sektor perpajakan Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur penerimaan pajak daerah mencapai 15,4 triliun rupiah pada tahun 2015. Kota batu merupakan bagian dari Povinsi Jwa Timur.

Kota Batu merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pajak yang besar. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Batu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah pemungutan pajak daerah secara intensif. Pajak daerah bagi Kota Batu merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang cukup tinggi. Gambaran struktur pajak daerah Kota Batu dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Batu Tahun 2012-2016

| Tahun | Target | Realisasi |
|--------------|----------------|------------------|
| 2012 | 20.625.000.000 | 28.187.860.661 |
| 2013 | 38.524.982.337 | 44.853.946.417 |
| 2014 | 50.000.000.000 | 62.807.445.882 |
| 2015 | 75.000.000.000 | 83.692.699.934 |
| 2016 | 94.100.000.000 | 88.757.389.919 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu (diolah oleh penulis,2019)

Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Batu setiap tahunnya mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak daerah jauh dari target yang telah ditentukan pemerintah. Meskipun pada tahun 2016 tidak memenuhi target tetapi realisasinya meningkat daripada tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak daerah Kota Batu tersebut tidak terlepas dari pengaruh penduduk dan kegiatan ekonomi Kota Batu. Menurut penelitian yang dilakukan

Nastiti (2015) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah memperoleh hasil bahwa penerimaan pajak daerah secara signifikan dipengaruhi oleh (1) PDRB, (2) Inflasi, dan (3) Jumlah Penduduk. Ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah karena memiliki pengaruh yang kuat. Berdasarkan teori makroekonomi dalam Sukirno (2012) juga menjelaskan bahwa penentuan kegiatan perekonomian didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, penduduk dan tingkat tenaga kerja atau pengangguran, kebijakan pemerintah dan hal lain yang berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan sangat berkaitan dengan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan nasional yang nantinya digunakan sebagai kas dan pembangunan negara .

Penduduk merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari komponen berdirinya suatu wilayah, secara *de facto* penduduk merupakan salah satu unsur utama pembentuknya. Maka dalam hal kajian mengenai penduduk suatu daerah hal yang penting yang dibahas terkait pengaruhnya terhadap daerah itu sendiri. Menurut Latumeirisa (2015) pentingnya penduduk suatu wilayah dikaitkan dengan 3 alasan utama yaitu alasan politik dan keamanan, alasan sosial, serta alasan ekonomis. Alasan ekonomis terkait proses pembangunan dan produksi yang ditentukan oleh jumlah dan kualitas penduduk atau tenaga kerja yang tersedia dalam proses tersebut. Berdasarkan teori makroekonomi dalam Sukirno(2012) Penduduk bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi yang selanjutnya menimbulkan penambahan produksi nasional dan meningkatnya ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Biasanya jumlah penduduk suatu wilayah dapat diketahui melalui sensus

penduduk. Kota Batu memiliki terbagi ke dalam 3 kecamatan yang terdiri kecamatan Bumiaji, kecamatan Junrejo, dan kecamatan batu sendiri. Dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 202.319 jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik,2017).

Jumlah penduduk yang cukup besar maka menjadi peluang kota Batu untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Semakin meningkat jumlah penduduk atau SDM berpotensi meningkatkan wajib pajak kota Batu sehingga jumlah penerimaan pajak daerah di Batu secara otomatis akan meningkat pula. Seperti yang dinyatakan oleh Pohan (2014) bahwa penduduk dan orang pribadi merupakan unsur yang selalu ada dalam pengertian dan fungsi pajak, karena penduduk dan orang pribadi dalam fungsi *badgetair* pajak merupakan subjek pajak yang memiliki pengaruh utama di dalam penerimaan pajak negara sebagai pemasukkan dana kas negara. Dari pengertian dan fungsi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan potensi untuk menggali objek-objek pajak disekitar mereka. Salah satunya miningkatkan sektor pajak restoran, hotel, parkir dan lain-lain yang merupakan aset pemerintah kota Batu.

Uraian tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap PAD. Namun hasil berlawanan diperoleh dari penelitian Fahmi (2015) tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah di Kabupaten Jombang, dimana jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang. Adanya perbedaan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah mengindikasikan bahwa jumlah

penduduk bisa menjadi keuntungan bagi penerimaan pajak daerah atau justru tidak memberikan keuntungan apapun bagi daerah. Sedangkan sumber Penerimaan PAD yang terbesar berasal dari sektor pajak daerah. Maka dari itu jumlah penduduk merupakan indikator penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya jumlah penduduk saja yang dapat memberikan dampak yang signifikan, disamping itu produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator dari segi perekonomian Kota Batu yang secara pesat berkembang. Seperti yang telah disinggung diatas bahwa dalam teori Makroekonomi juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Dimana produk domestik bruto (PDB) bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. PDB contoh besar dalam suatu negara jika dalam suatu daerah dinamakan PDRB. Arifin (2007) mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah (region) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan informasi BPS Kota Batu menyatakan bahwa Kota Batu salah tujuan wisata di Jawa Timur. Karena banyaknya tempat wisata yang setiap tahun bertambah dengan memanfaatkan kondisi alam dan iklim, banyaknya hotel dan restoran yang terus berkembang serta memperdayakan industri besar/sedang dan kecil yang berkontribusi cukup signifikan dalam membentuk PDRB Kota batu. Dengan bertambah PDRB yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Batu.

Surya Malang (www.suryamalang.com, 2015) menyatakan Kota Batu memiliki tiga sektor andalan dalam yang berkontribusi dominan untuk meningkatkan PDRB yaitu sektor usaha jasa perdagangan, sektor usaha perhotelan, dan sektor usaha jasa restoran. Ketiga sektor tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan pajak daerah. Semakin besar kontribusi dari ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian Kota Batu tentunya akan memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah kota Batu.

Hal lain yang melatarbelakangi penerimaan pajak daerah yaitu tingkat inflasi. Inflasi berpengaruh pada konsumsi masyarakat, dimana banyaknya barang-barang yang beredar. Berdasarkan teori Keynes dalam Putong (2013) mengemukakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar kemampuan ekonominya dan menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat yang bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang. Inflasi sendiri merupakan keadaan dimana kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus dan terjadi dalam satu periode tertentu (Nopirin, 2012). Tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. BPS Kota Batu melaporkan bahwa pada tahun 2013 perekonomian di Kota Batu masih menunjukkan kestabilan seperti pada tahun sebelumnya meskipun pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga BBM, hal tersebut di tandai dengan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi dan penerimaan pajak daerah tidak menunjukkan penurunan, meskipun beberapa barang lain mengalami kenaikan akibat kenaikan harga BBM.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Nastiti (2015) membuktikan bahwa Jumlah Penduduk, PDRB, dan Inflasi berpengaruh

secara signifikan dan positif terhadap pajak daerah di Kabupaten Madiun. Lebih lanjut Susanto (2014) juga membuktikan bahwa Jumlah Penduduk, PDRB, dan Inflasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PAD Kota Malang. Namun penelitian dari Nalendra (2014) membuktikan bahwa PDRB memiliki pengaruh secara signifikan positif dan Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Barat, serta penelitian Saputra (2014) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif sedangkan inflasi dan PDRB tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Kabupaten Tulung Agung. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu pada Tahun 2012-2016, karena pada tahun tersebut penerimaan pajak daerah setiap tahunnya meningkat secara signifikan dan kondisi perekonomian menunjukkan kestabilan meskipun pada pertengahan tahun 2013 terjadi kenaikan harga BBM, hal ini ditandai dengan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi yang mengakibatkan beberapa komoditi mengalami kenaikan akibat kenaikan BBM dan ingin membuktikan apakah Tingkat Inflasi berpengaruh atau tidak terhadap Penerimaan pajak Daerah.

Penelitian ini dirasa penting karena untuk mengetahui sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sangat penting guna pembangunan suatu daerah dan disisi lain pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan pajak Daerah dengan

tujuan daerah dapat meminimalisir yang dapat mempengaruhi penurunan Pajak daerah.

Dari uraian yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa kota Batu merupakan kota yang perkembangan produksi dan jumlah penduduknya cukup banyak sehingga penerimaan pajak nya semakin meningkat dan beberapa teori menyebutkan bahwa jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu?
2. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di kota Batu?
3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang hendak dijawab oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu.
2. Untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu.

C. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang maksimal, baik kontribusi secara teoritis maupun kontribusi secara praktis terhadap beberapa pihak, berikut kontribusi yang diharapkan:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Menambah bukti empiris terkait bidang ilmu perpajakan khususnya tentang analisis pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah sehingga bisa bermanfaat sebagai tinjauan pustaka bagi penelitian selanjutnya
- b. Menambah wawasan pembaca mengenai otonomi, pajak, dan daerah Kota Batu terutama jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, tingkat inflasi dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah kota Batu penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi dan kebijakan publik terkait jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, tingkat inflasi dan pajak daerah sehingga diharapkan dapat peningkatan penerimaan pajak daerah daerahnya.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, tingkat inflasi dan pajak daerah dalam ilmu pengetahuan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditujukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun model konseptual dan hipotesis yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi yang dilakukannya penelitian, penyajian, data penelitian, analisis data seperti analisis deskriptif, analisis linier berganda dan uji hipotesis beserta penjelasan mengenai pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu secara parsial.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan referensi penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pajak daerah antara lain:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-----------------|--|---|
| 1. | Nastiti (2015) | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada “Badan Pembangunan Daerah” Kabupaten Madiun) | Diantara variabel PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk yang memiliki pengaruh yang signifikan dan pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun adalah PDRB |
| 2. | Nalendra (2014) | Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012) | PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak, dengan memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dengan memiliki hubungan yang kuat |

| | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 3. | Asmuruf, dkk (2015) | Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong | PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD kota Sorong. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong |
| 4 | Saputra (2014) | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah (Study pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulung Agung) | Diantara variabel Inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB yang memiliki pengaruh yang signifikan dan paling dominan terhadap penerimaan pajak adalah jumlah penduduk, sedangkan inflasi dan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan. |
| 5 | Fahmi (2015) | Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang (Tahun 1998-2013) | Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak Daerah di Kabupaten Jombang. Secara parsial, PDRB dan belanja daerah berpengaruh positif sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah |
| 6 | Susanto (2014) | Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Dari ketiga variabel yaitu PDRB, Penduduk, dan Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap |

| | | | |
|--|--|---|-----|
| | | (PAD) (Studi Kasus Kota Malang tahun 1998 - 2012) | PAD |
|--|--|---|-----|

Sumber : diolah oleh penulis (2019)

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Makroekonomi

Makroekonomi adalah teori dasar kedua dalam ilmu ekonomi. Teori makroekonomi melihat kegiatan ekonomi dengan memperhatikan gambaran kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Masalah utama dalam perekonomian dilihat dari makro ekonomi yang pertama, tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dan jumlah serta kualitasnya. Selanjutnya masalah ketidak stabilan ekonomi, perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur adalalalnya sangat merosot. Kedua, masalah penduduk atau ketenagakerjaan Penduduk bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi yang selanjutnya menimbulkan penambahan produksi nasional dan meningkatnya ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Ketiga, masalah kenaikan harga-harga, faktor penyebab inflasi antara lain adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa, serta para pekerja diberbagai kegiatan ekonomi yang menuntut kenaikan upah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa teori makroekonomi adalah penentuan kegiatan perekonomian didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, penduduk dan tingkat tenaga kerja atau pengangguran, kebijakan pemerintah dan hal lain yang berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan sangat berkaitan dengan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan nasional yang nantinya digunakan sebagai kas dan pembangunan negara

2. Teori Keynes

Teori Keynes teori yang didasarkan pada teori makronya yang menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat cenderung ingin hidup diluar batas ekonominya. Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini menimbulkan tetap adanya *inflationary gap* yang maka selama itu pula proses inflasi terjadi berkelanjutan. Keynes tidak sependapat dengan pandangan yang diajukan dalam teori kuantitas. Teori kuantitas tersebut menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kenaikan tingkat harga, namun tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional kemudian Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar saja, namun juga ditentukan oleh kenaikan biaya produksi.

Teori Keynes terjadi karena masyarakat hidup diluar kemampuan ekonominya dan menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat yang bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika permintaan barang lebih besar dari barang-barang yang tersedia maka akan menimbulkan

inflasi. Selama inflasi masih tetap tinggi maka besar kemungkinan inflasi akan tetap terjadi jika pemerintah tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan laju inflasi.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi yang berlaku di Indonesia sebagai wujud dari diberlakukannya wewenang suatu daerah dengan mengatur dan menyelenggarakan daerahnya sendiri tetapi masih dalam pengawasan pemerintah pusat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah tersebut diharapkan suatu daerah mampu mengatur, mengembangkan, dan menyelenggarakan daerahnya semaksimal mungkin guna menggalang sumber-sumber potensi pada daerahnya masing-masing. Bersamaan dengan diberlakukannya otonomi daerah juga disahkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah memiliki arti yang berbunyi: “ Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang”.

Menurut Wayong dalam Hendratno (2009) mengemukakan bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya sendiri, mengembangkan daerahnya sendiri memiliki peran penting untuk menentukan kebijakannya sendiri. Disini, masyarakat

juga memiliki peran penting untuk tidak hanya menyalurkan kreativitasnya dan menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya menentukan nasibnya sendiri (Hendratno,2009).

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah sebagai sumber pendapatan negara yang diwajibkan dan dipaksakan kepada rakyat. Dana yang dari iuran rakyat tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan dan kebutuhan negara, salah satunya untuk membangun infrastruktur negara. Berikut ini definisi pajak menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya berjudul Perpajakan dalam Mardiasmo, (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdaaasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
- 2) Menurut S.I Djajadiningrat dalam bukunya berjudul Perpajakan Teori dan Kasus dalam Siti Resmi (2013) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negaransecara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- 3) Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam bukunya berjudul Perpajakan Teori dan Kasus dalam Siti Resmi (2013) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-normayang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pengertian pajak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu: “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu peranan yang penting bagi kehidupan negara, khususnya pembangunan dan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaranyang dibutuhkan. Sehingga pajak mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut menurut Siti Resmi (2013):

- 1) Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik ritin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempih dengan cara ekstenfikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- 2) Fungsi Regulerend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

c. Jenis Pajak

Menurut mardiasmo (2013) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya pajak penghasilan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contohnya Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2013), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Berikut merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan pajak daerah menurut Siahaan (2013):

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta desember 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001
6. Keputusan Presiden, Keutusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota dibidang pajak daerah.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , jeni-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan, dan e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi
 - a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; e) Pajak Reklame; f) Pajak Penerangan Jalan; g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; h) Pajak Parkir; i) Pajak Air Tanah; j) Pajak Sarang burung Walet; k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; l) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Menurut mardiasmo 2013 tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% atas pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
3. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% atas jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
4. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% atas nilai sewa reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% atas nilai jual tenaga listrik.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25% atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% atas nilai perolehan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10% atas nilai jual sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% atas nilai jual objek pajak (NJOP).
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5% atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

e. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor tau nilai lain yang pakai sebagai dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semuan jenis pajak pusat (Siahaan, 2013:91) .

Pajak Terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan pajak

Contoh: untuk pajak hotel maka cara perhitungannya adalah tarif pajak hotel sebesar 10% X jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel.

6. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal dan menetap disuatu daerah. Penduduk adalah salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah, karena dengan mengetahui jumlah penduduk suatu daerah dapat menentukan apakah daerah tersebut dikatakan maju atau sebaliknya.

a. Peran Penduduk

Penduduk merupakan variabel penting dalam perkembangan perekonomian suatu daerah. Menurut Latumaerisa (2015) peran penting penduduk dikaitkan dengan 3 (tiga) alasan utama yaitu:

1) Alasan Politik dan Keamanan

Bahwa jumlah penduduk dianggap sengai salah satu faktor kekuasaan negara yang satu terhadap negara yang lainnya. Jika jumlah penduduk dapat diketahuidengan pasti, maka suatu negara akan mudah membuat keputusan terkait sumber daya manusia yang dapat mempertahankan dan menjaga keamanan negara dari serangan negara lain

2) Alasan Sosial

Bahwa jumlah penduduk penting untuk diketahui berkaitan dengan berapa banyaknya pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduknya. Misalnya, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan lain sebagainya.

3) Alasan Ekonomis

Bahwa informasi jumlah penduduk dibutuhkan untuk mengetahui keseimbangan antara sumber-sumber daya dengan jumlah penduduk, besarnya pendapatan per jiwa, perencanaan ekonomi, banyaknya tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan, dan jumlah

tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam, perindustrian, pertanian, dan lain sebagainya

b. Sensus Penduduk

Cara untuk mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah dapat dilakukan melalui sensus penduduk. Sensus penduduk pada mulanya dilakukan hanya untuk mengetahui berapa jumlah penduduk, keperluan pemungutan pajak dan keharusan untuk menjadi angkatan bersenjata (Latumaerissa, 2015). Saat ini tujuan mengetahui jumlah penduduk lebih kepada kegunaannya sebagai data dalam mengambil keputusan tentang perencanaan ekonomi, sosial, dan perencanaan program pemerintah lainnya. Menurut (Latumaerissa,2015) jumlah penduduk dapat diketahui dengan 2 cara :

1) Sensus De Facto

Menurut sensus ini penduduk adalah setiap orang yang pada waktu diadakan sensus berada dinegara bersangkutan (warga negara –WNA-turis) dicatat dalam daftar sensus serta dianggap penduduk. Tegasnya pada saat diadakan sensus semua manusia tyang ada dicatat dalam daftar sensus dan dianggap penduduk. Sensus de facto ini biasanya diadakan di negara-negara Eropa.

2) Sensus De Jure

Menurut sensus ini yang dianggap sebagai penduduk suatu negara adalah mereka yang bertempat tinggal dinegara bersangkutan baik warga negara asing. Wisatawan tidak termasuk penduduk serta tidak di catat ke dalam daftar sensus, demikian juga misanya seorang yang bertempat tinggal di Bandung (KTP Bandung), tetapi bekerja di Jakarta maka orang tersebut bukan penduduk Jakarta

dan dicatat pada sensus di Bandung. Biasanya sensus de jure dilakukan di negara-negara Asia, Amerika Utara, dan Afrika.

Menurut Pohan (2014) menyatakan bahwa penduduk dan orang pribadi merupakan unsur yang selalu ada dalam pengertian dan fungsi pajak, karena penduduk dan orang pribadi dalam fungsi *budgetair* pajak merupakan subjek pajak yang memiliki pengaruh utama di dalam penerimaan pajak negara sebagai pemasukkan dana kas negara. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penduduk sebagai subjek berkontribusi secara langsung dalam meingkatkan penerimaan pajak negara maupun pada penerimaan pajak daerah. Soemitro (1990) juga menyatakan bahwa pajak mempunyai unsur yaitu : harus ada undang-undang, harus ada pemungut, harus ada subjek dan objek, serta masyarakat. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak. dalam teori pertumbuhan klasik dikatakan bahwa penduduk bertambah namun tidak terlalu banyak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa penerimaan pajak daerah bertambah jika jumlah penduduk dalam suatu daerah mengalami kenaikan, sehingga kemampuan penduduk dalam pungutan daerah juga mengalami kenaikan.

Terkait pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah juga diperkuat oleh penelitian Norfridwitya (2011) bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat pula karena adanya penduduk yang produktif dalam perekonomian. Sedangkan penduduk berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dimana sumber daya manusia yang berupa kualitas dan kuantitasnya berpengaruh dan berdampak langsung pada pembangunan suatu

wilayah. Peran penduduk dalam perekonomian suatu daerah yaitu sumbangan yang bersifat memaksa dan diwajibkan oleh pemerintah daerah yang berupa pajak dan retribusi. Sedangkan pada Khusaini (2006) menyebutkan bahwa, peranan pajak salah satu unsur PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian.

Jadi apabila penduduk dalam suatu daerah mengalami kenaikan maka akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak, karena adanya sumbangan pajak bersifat memaksa dan wajib dari pendapatan penduduk kepada pemerintah.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Arifin (2007) Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah (region) baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kota Batu PDRB merupakan salah satu indikator penting yang menentukan keadaan perekonomian suatu wilayah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga belaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode.

Terkait dengan pajak, apabila PDRB suatu daerah naik maka kemampuan dalam membayar pajak akan naik pula, karena salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat potensi pajak suatu negara adalah rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara (Halim, 2016). Syahputra (2006), juga menyatakan bahwa faktor penentu penerimaan pajak ditentukan oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro dan faktor internal seperti kebijakan dibidang perpajakan, faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi, pernyataan tersebut dalam skala nasional. Jika pendapat tersebut diterapkan dalam skala regional maka jika persentase PDRB naik khususnya meningkatnya pendapatan dan tingkat konsumsi maka penerimaan pajak daerah juga ikut meningkat. Pendapat Devas (1986) dalam bukunya Syahputra (2006) juga mengatakan bahwa upaya pengumpulan pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi kemampuan membayar pajak, kemampuan bayar pajak secara keseluruhan dapat berupa Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Dari pernyataan tersebut bahwa suatu daerah jika PDRB meningkat maka sangat besar pengaruh nya kepada peningkatan penerimaan pajak suatu daerah. Sebab kenaikan PDRB setiap tahunnya mengalami kenaikan terhadap penerimaan pajak daerah secara optimal jika pengelolaannya secara maksimum.

Dalam penelitian Saputra (2014) juga menjelaskan bahwa PDRB sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah karena apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat pula yang otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Norfridwitya (2011) juga menjelaskan tentang PDRB perkapita riil yaitu:

“ semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan semakin meningkat juga”.

Maksudnya bahwa PDRB perkapita mempunyai dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah. Karena jika kemampuan seseorang dalam membayar berbagai pungutan ke daerah terjadi kenaikan baik secara riil maupun nominal, maka hubungan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai dampak positif. Pada PDRB juga terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2. Pertambangan dan Panggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Kominikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan , 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-subnya.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh farktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Alam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1). Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, 2). Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, 3). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. 4). Pembentukan modal tetap domestik bruto, 5). Perubahan investor, dan 6). Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

8. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Dalam suatu kota tidak akan terlepas dari tingkat inflasi karena tinggi rendahnya inflasi akan selalu berpengaruh pada perekonomian, inflasi sendiri ialah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2012). Keadaan dimana permintaan barang terlalu tinggi tapi bukan berarti harga berbagai macam barang tersebut naik dengan persentasi yang sama dan kenaikan tersebut dalam periode yang sama. Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba akibat suatu peristiwa diluar ekspektasi pemerintah misalnya pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar dan ketidakstabilan politik (sukirno, 2012). Tingkat Inflasi sendiri merupakan pesentasi kenaikan yaitu apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat niscaya akan mengalami perubahan yang berdampak pada penerimaan pajak Rosyidi (dalam Nelendra ,2014).

Tingkat inflasi berdampak besar bagi perekonomian suatu negara, jika inflasi tinggi maka akan mempengaruhi penerimaan pajak karena jika suatu daerah mengalami inflasi yang cukup tinggi angka penjualan akan merosot dan konsumen akan mengurangi belanja. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Natsir (2014) yang menyatakan jika angka inflasi terus meningkat maka angka penjualan mereka akan merosot dan konsumen akan mengurangi belanja yang dapat menimbulkan produksi turun, yang pada akhirnya penerimaan pajak juga menurun.

Menurut teori Keynes dalam Putong (2013) mengatakan bahwa:

“ Inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar kemampuan ekonominya dan menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat yang bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia”.

Selama inflasi masih tetap tinggi maka besar kemungkinan inflasi akan tetap terjadi jika pemerintah tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan laju inflasi. Hal tersebut didukung dari perkataan Nopirin (2012) bahwa kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total otomatis mempengaruhi harga. Misalnya jika inflasi dapat dicegah dengan penurunan permintaan total maka kebijakan fiskal yang berupa kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan kenaikan pajak dilakukan untuk menahan laju inflasi.

b. Jenis Inflasi

Inflasi menurut Putong (2013) mempunyai beberapa jenis diantaranya :

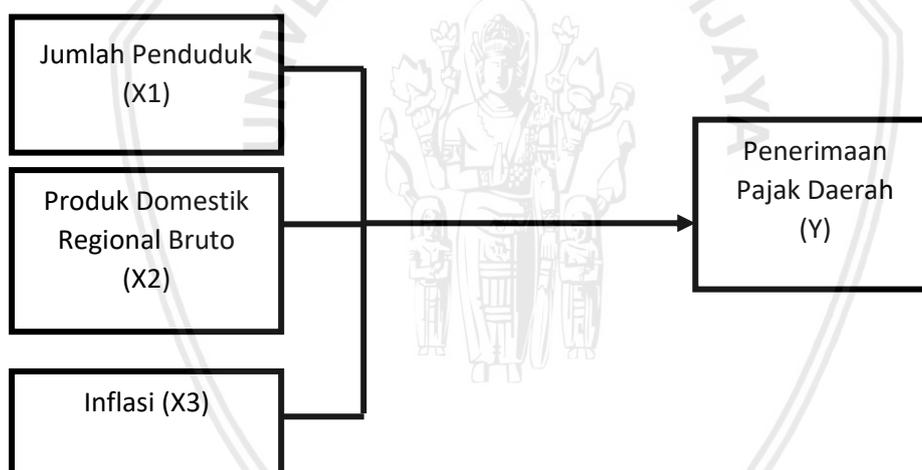
1. Menurut sifatnya
 - a) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun
 - b) Inflasi menengah (*galloping inflasition*) besarnya antara 10% - 30%. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Inflasi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%.

- c) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun. Dalam kondisi harga-harga secara umum naik bahkan menurut istilah ibu rumah tangga harga berubah.
 - d) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.
2. Berdasarkan sebabnya
- a) *Demand pull inflation*. inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak, dipihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh, akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi berkepanjangan.
 - b) *Cost push inflation*. inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya).
3. Berdasarkan asalnya
- a) Dalam negeri (*domestik inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara.

- b) Luar negeri karena negara-negara yang menjadi mitra dagang mengalami inflasi yang tinggi, dapat diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja mahal.

C. Kerangka Konseptual

Model penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:



Gambar 1: Model Konseptual

Sumber : diolah oleh penulis (2019)

Model konseptual ini menjelaskan hubungan antara Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Pola pada model konseptual ini menjelaskan hubungan antar variabel secara teoritis berdasarkan studi literatur dan observasi yang telah dilakukan yang akan menghasilkan beberapa hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif dan berpengaruh signifikan antara jumlah penduduk,

PDRB dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Batu. Hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jumlah penduduk ada hubungan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Makdalena, dkk (2015) dalam penelitiannya berjudul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Secara tidak langsung pengaruh positif terhadap PAD ini menunjukkan pada penerimaan penerimaan pajak daerah, karena pajak daerah indikator yang paling utama dalam pada PAD.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang lain yaitu PDRB juga dapat menyebabkan peningkatan terhadap penerimaan pajak daerah. Dugaan berdasarkan asumsi jika semakin besar PDRB pada suatu daerah maka akan semakin besar pula nilai ekonomi sehingga tinggi nya PDRB akan berpotensi untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak daerah. Dugaan tersebut dibuktikan dari penelitian Chintia (2015) dan Nalendra (2014) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah yaitu inflasi. Inflasi akan berdampak pada penerimaan pajak suatu pemerintahan kota, karena apabila harga barang terlalu tinggi masyarakat akan mengurangi untuk konsumsi barang dan jasa sehingga dapat berpengaruh pada penerimaan dan pungutan pajak yang telah pemerintah tetapkan. Dugaan tersebut dibuktikan dipenelitian susanto (2014) yang menyatakan jika inflasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota Malang. Sedangkan penerimaan pajak daerah masuk dalam pendapatan asli daerah karena secara langsung barang dan jasa

dikenakan pajak konsumen yang otomatis meningkatkan penerimaan pajak daerah.

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan ladsan teori dan kerangka berfikir. Menurut Darmawan (2013) hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian , oleh karena itu rumusan masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pada suatu penlitian hipotesis bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji dan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Berikut penjelasan mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan semua orang yang ada di suatu daerah dan bertujuan untuk menetap. Berdasarkan teori makroekonomi Penduduk bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi yang selanjutnya menimbulkan penambahan produksi nasional dan meningkatnya ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Sedangkan menurut Pohan (2014) menyatakan bahwa penduduk dan orang pribadi merupakan unsur yang selalu ada dalam pengertian dan fungsi pajak, karena penduduk dan orang pribadi dalam fungsi *badgetair* pajak merupakan subjek pajak yang memiliki pengaruh utama di dalam penerimaan pajak negara sebagai pemasukkan dana kas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Asmuruf, dkk (2015) yang berjudul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan ali daerah (PAD)

di kota Sorong dan Saputra (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah (Study pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulung Agung) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, Namun hasil berlawanan diperoleh dari penelitian Fahmi (2015) tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah di Kabupaten Jombang, dimana jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jombang.. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menarik hipotesis :

H₁ : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Arifin (2007) mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat disuatu wilayah (region) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang menentukan keadaan perekonomian suatu wilayah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2016). Berdasarkan teori Makroekonomi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, Dimana produk domestik bruto (PDB) adalah bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun

tertentu. Syahputra (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui besaran pajak. Peningkatan PDRB akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah karena jika semakin tinggi peningkatan PDRB maka akan semakin berkembang pula ekonomi suatu daerah sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Nastiti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah membuktikan bahwa semakin tinggi PDRB semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah. PDRB merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat suatu perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan Syahputra (2006) menyatakan faktor penentu penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal seperti kebijakan di bidang perpajakan dan faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro. Berdasarkan Syahputra (2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi, selain itu juga akan meningkatkan jumlah pajak masyarakat yang sebelumnya belum membayar pajak menjadi pembayar pajak dengan tarif tertentu. Apabila PDRB meningkat maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan pajak yang telah ditetapkan sehingga potensi penerimaan pajak daerah juga akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nastiti (2015) dan Nalendra (2014) membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan pajak daerah, bahkan pada penelitian Nastiti PDRB yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) dan Asmuruf, dkk (2015) membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menarik hipotesis :

H₂ : Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

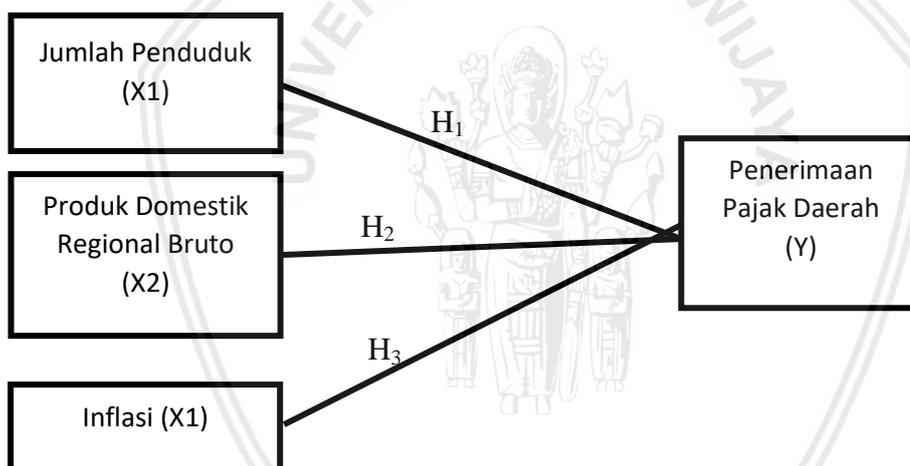
Sukirno (2012) inflasi adalah kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikannya. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat niscaya akan mengalami perubahan, yang berdampak pada penerimaan pajak menurut Rosyidi (dalam Nalendra, 2014). Berdasarkan teori Keynes dalam Putong (2013) mengemukakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar kemampuan ekonominya dan menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat yang bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang. Sedangkan Natsir mempunyai (2014) pendapat yang menyatakan jika angka inflasi terus meningkat maka angka penjualan mereka akan merosot dan konsumen akan mengurangi belanja yang dapat menimbulkan produksi turun , keuntungan turun yang pada akhirnya penerimaan pajak suatu negara atau daerahpun juga menurun.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Susanto (2014) dan Nastiti (2015) membuktikan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Nalendra (2014) yang

membuktikan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, dengan memiliki hubungan yang kuat. Serta penelitian Saputra (2014) yang membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menarik hipotesis :

H₃ : Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengembangan hipotesis tersebut menghasilkan dua hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini. Berikut penjelasan hipotesis penelitian melalui gambar 3.



Gambar 2: Model Hipotesis

Sumber : diolah oleh penulis (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara yang sistematis atau prosedur untuk menyelidiki sesuatu secara hati-hati (Zulganef,2013). Lebih lanjut menurut pendapat (Sugiyono,2008) mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jadi secara garis besar, metode penelitian adalah prosedur dalam melaksanakan penelitian, dengan menggunakan alat-alat untuk mengumpulkan data serta dengan teknik apa yang digunakan dalam menganalisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory*. Penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2013) biasanya digunakan untuk meneliti populasi dan sampel, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Pendekatan *explanatory* merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu (zulganef,2013).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan secara kuantitatif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang menjadi fenomena dalam bentuk angka, mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian seperti yang ada dalam topik penelitian. Sedangkan alasan peneliti mengambil jenis penelitian *explanatory* ini adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel

Jumlah Penduduk, produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Batu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data penelitian diperoleh. Penelitian ini terkait dengan bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Batu. Peneliti mengambil lokasi penelitian pada Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Batu yang berlokasi di Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 1, jalan Panglima Sudirman nomor 117, Pesangrahan Kota Batu, *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu (www.batukota.bps.go.id) dan *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang (www.malangkota.bps.go.id).

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Batu karena Kota batu merupakan salah satu kota yang menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat dan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan yang terus meningkat yang berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dari segi perekonomian Kota Batu yang berkembang pesat bisa dilihat dari berkembangnya kawasan wisata kota batu yang didukung alam dan iklim serta berkembangnya industrialisasi yang meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan sebagian besar penduduk sebagai peluang bisnis sehingga menarik jumlah pendatang dari kota lain untuk berkunjung. Berdasarkan BPS Kota Batu Pada tahun 2012 hingga 2016 keadaan penduduk dan ekonomi di Kota batu cenderung peningkatan yang stabil dan tidak mengalami penurunan sehingga tingkat inflasi di Kota Batu cenderung stabil.

C. Definisi Operasional Variabel

Menurut Nazir (2014) variabel merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, konsep dapat berubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Jadi variabel merupakan nilai dari suatu objek yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2008):

1. Variabel Independen

Variabel independen atau yang biasanya disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas ini biasanya diistilahkan dengan menggunakan huruf X. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Jumlah Penduduk (X_1) adalah jumlah semua orang yang berdomosili atau bertempat tinggal di daerah Batu yang bertujuan untuk menetap. Penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk yang diperoleh dari *website* resmi BPS Kota Batu pada periode 2012 hingga 2016 atau selama 5 tahun dengan unit bulanan 60 bulan. Ukuran penelitian menggunakan dalam satuan jiwa.

- b. Produk Domestik Regional Bruto /PDRB (X_2) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS,2016). Penelitian ini menggunakan data PDRB yang diperoleh dari BPS Kota Batu pada periode 2012 hingga 2016 atau selama 5 tahun dengan unit bulanan 60 bulan. Ukuran penelitian menggunakan dalam satuan rupiah.
- c. Inflasi (X_3) adalah kenaikan harga-harga yang bersifat menyeluruh dan terus menerus dari satu periode ke periode lain. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan data Tingkat Inflasi menurut indeks harga konsumen yang diperoleh dari *website* BPS Kota Batu/Malang pada periode 2012 – 2016 atau selama 5 tahun. Ukuran penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk persen (%).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang biasanya disebut variabel terikat variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah (Priantara,2012). Data penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Badan keuangan Daerah (BKD) Kota Batu pada periode 2012 – 2016 atau selama 5 tahun. Ukuran penelitian yang digunakan adalah satuan rupiah.

D. Konsep, Variabel, Indikator, dan Item

Tabel 4. Konsep, Variabel, Indikator, dan Items

| Konsep | Variabel | Indikator | Items |
|---------------|---------------------------------------|--|---|
| Ekonomi Makro | Jumlah Penduduk (X_1) | Jumlah Penduduk | Jumlah penduduk di Kota batu pada periode 2012 - 2016 dengan unit bulanaan dan dengan satuan jiwa |
| | PDRB (X_2) | PDRB | PDRB di Kota Batu pada periode 2012 – 2016 dengan satuan bulanaan. Data yang digunakan adalah data PDRB atar dasar harga berlaku dengan ukuran rupiah (Rp). |
| | Tingkat Inflasi (X_3) | Tingkat Inflasi | Tingkat Inflasi di kota Batu pada periode 2012 – 2016, dengan unit bulan dan ukuran persen (%) |
| Perpajakan | Penerimaan Pajak daerah Kota Batu (Y) | Jumlah seluruh objek Penerimaan pajak Daerah Kota Batu | Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu pada periode 2012 – 2016, dengan unit bulanaan. |

Sumber: diolah oleh penulis(2019)

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Menurut sugiyono (2008) wilayah generalisasi yang terdiri atas abjek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berupa data tahunan jumlah penduduk, PDRB, tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah Kota Batu.

2. Sampel

Sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dituhkan dalam mengungkapkan penelitian. Sampel dalam penelitian diambil dari sebagian populasi. Menurut sugiyono (2008) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan sampel peneliti akan menggunakan teknik sampling. Pendekatan sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Non-probability sampling teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (sugiyono,2008). Purposive sampling merupakan teknik untuk memperoleh informasi dari sasaran-sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti, karena hanya sampel tersebut saja yang mewakili (Zulganef,2013). Adapun yang digunakan sebagai kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Jumlah minimal data yang digunakan adalah 5 tahun terakhir,dengan unit bulanan yaitu sebanyak 60 bulan.

- b. Data tersedia dan dapat diperoleh di instansi Badan keuangan Daerah (BKD) ,Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang.
- c. Penduduk yang berdomisili di kota Batu dan tercatat di Badan Statistik (BPS) Kota Batu.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk, PDRB, tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah dari tahun 2012 hingga 2016. Sampel tersebut merupakan data 5 tahun terakhir yang dimiliki oleh BKD Kota Malang, BPS Kota Batu dan BPS Kota Malang selaku pemilik data mengenai jumlah penduduk, PDRB, tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Menurut sarwono (2006), jenis data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder, data primer data yang diperoleh sumber asli atau pertama, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan. Sedangkan menurut Kuncoro (2009) data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal, sedangkan data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data resmi berupa data Jumlah Penduduk, PDRB , Tingkat Inflasi dan

Penerimaan pajak daerah Kota Batu dalam kurun waktu 2012 -2016. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Jumlah Penduduk (dalam bentuk laporan tahunan) yang dipublikasi secara *online* melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Batu www.batukota.bps.go.id yang dirubah menjadi data bulanan melalui teknik interpolasi data menggunakan *e-views 7.0* dalam kepentingan analisis data.
- b. Data PDRB (dalam bentuk laporan tahunan) yang dipublikasi secara *online* melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Batu www.batukota.bps.go.id yang dirubah menjadi data bulanan melalui teknik interpolasi data menggunakan *e-views 7.0* dalam kepentingan analisis data.
- c. Data Tingkat Inflasi yang dipublikasi secara *online* melalui *website* Badan Pusat Statistik Kota Malang www.malangkota.bps.go.id yang berbentuk data bulanan.
- d. Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dokumentasi. Menurut sanusi (2014) cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam penelitian ini pengumpulan data atau pengambilan data melalui laporan tahunan dari *website* resmi BPS Kota Batu, *website* resmi BPS Kota Malang, dan BKD Kota Batu BPS. Data yang digunakan berdasarkan laporan tahunan yang dipublikasikan yang meliputi data jumlah penduduk, produk

domestik regional bruto (PDRB), tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah selama tahun 2012 hingga 2016.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi,2014). Dalam penelitian ini alur teknisk analisis data yang akan digunakan meliputi: Pertama, analisis statistik deskriptif, kedua uji asumsi klasik, ketiga analisis regresi linier berganda, dan keempat pengujian hipotesis. Berikut uraian dari masing-masing teknik analisis data yang akan dilakukan:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberi penjelasan secara umum atas data yang telah dikumpulkan agar dapat di pahami dengan mudah kondisi masing-masing variabel. Menurut Sanusi (2014) mengatakan statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, rat-rata, perhitungan persentase, serta pertumbuhan masing-masing variabel jumlah penduduk, PDRB, tingkat inflasi penerimaan pajak daerah Kota Batu selama tahun 2012 hingga 2016.

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan analisis data regresi harus memenuhi asumsi-asumsi agar menghasilkan nilai-nilai koefisiennya valid dalam menyelesaikan penelitian. Salah satu yang harus dipenuhi ialah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu sendiri terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data yang akan dianalisis normal atau tidak, sehingga bisa digunakan dalam analisis parametrik. Tetapi apabila data tidak berdistribusi normal maka tidak dapat digunakan analisis parametrik melainkan non parametrik. Dalam analisis ini pengujian normalitas data menggunakan pendekatan uji Kolmogorof-Smirnov atau uji K-S. Uji K-S ini termasuk dalam golongan non-parametrik karena peneliti belum mengetahui apakah data yang digunakan termasuk data parametrik atau bukan. Pada uji K-S data dikatakan normal apabila nilai sign $> 0,05$ (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015).

b. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model pengujian seperti liner berganda, maka data harus terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Heterokedastisitas berarti variasi residual tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga variansi residual harus bersifat homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Dalam uji heteroskedastisitas peneliti menggunakan model Glejser yaitu model dikatakan bersifat

homoskedastisitas apabila nilai Sign. Pada variabel independen lebih dari ($>$) 0,05.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Pada penelitian ini pengujian multikolinieritas dapat dilihat dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) yaitu dalam model VIF ini jika menghasilkan nilai VIF $<$ 10 maka termasuk dalam model regresi yang baik, sedangkan jika menghasilkan nilai $>$ 10 maka telah terjadi multikolinieritas yang serius dalam model regresi. Selain melihat VIF, bisa juga dideteksi nilai *tolerance*, yaitu jika nilai *tolerance* mendekati 1 maka tebebas dari gejala multikolinieritas tetapi jika menjauhi 1 maka telah terjadi gejala multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi hanya dapat dilakukan jika penelitian yang digunakan berbentuk *time series* dan apabila data yang digunakan berbentuk *cross section* maka uji autokorelasi tidak perlu digunakan. Pengujian autokorelasi digunakan untuk melihat hubungan linier antara *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau *data time series* (Lupiyoadi dan ikhsan, 2015). Untuk melihat atau mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test). Menurut Priyatno (2014) pengambilan keputusan pada uji DW Test sebagai berikut :

- a) $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- b) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$, maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- c) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

G. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Priyatno (2014), analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Sedangkan menurut Lupioadi dan Ikhsan (2015) analisis regresi berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen Y . Secara umum model regresi linier berganda untuk populasi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Y | = penerimaan pajak daerah |
| a | = nilai konstanta |
| b_1, b_2, b_3 | = koefisien regresi |
| X_1 | = jumlah penduduk |
| X_2 | = PDRB |
| X_3 | = Tingkat inflasi |
| E | = <i>error</i> / residu |

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan bantuan SPSS 21.

H. Uji Hipotesa

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu (Ghozali,2013). Nilai R^2 yang kecil atau $R^2=0$ berarti kemampuan variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependen terbatas sedangkan nilai $R^2 = 1$ maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam prediksivariasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan bantuan SPSS 23 yang hasilnya nanti akan terlihat pada tabel model summary. Nilai R^2 yang banyak peneliti anjurkan yaitu menggunakan nilai adjusted R^2 , tidak seperti R^2 nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2013).

b. Uji T

Uji t digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar-benar memberikan secara parsial pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali,2013). Uji t menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Adapun analisis yang digunakan:

a. Perbandingan nilai signifikan dengan taraf nyata

1.1 Bila nilai signifikansi \geq taraf nyata (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

1.2 Bila nilai signifikansi $<$ taraf nyata (0,05), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

- b. Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}
- 1.1 Bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
 - 1.2 Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak diantara 122,17'o sampai dengan 122,57' o bujur timur dan 7,44'o sampai dengan 8,26'o lintang selatan. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan disebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Blitar di sebelah selatan, dan Kabupaten Malang barat. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 km² terbagi ke dalam 3 kecamatan yaitu Batu, Junrejo, dan Bumiaji. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas dibandingkan dua kecamatan lainnya. Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di kota Batu terletak di daerah perbukitan atau lereng.

Seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah RI No.12 Tahun 1993, tanggal 6 maret 1993, kecamatan Batu meningkat menjadi Kota Administratif Batu. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif. Pada tanggal 17 Oktober 2001, batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota

a. Jumlah Penduduk (X_1)

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2012 – 2016

| No | Tahun | Jumlah penduduk | |
|----|-------|-----------------|----------------|
| | | jiwa | Prosentase +/- |
| 1 | 2012 | 194.793 | 1,14 % |
| 2 | 2013 | 196.951 | 1,17 % |
| 3 | 2014 | 198.608 | 1,17 % |
| 4 | 2015 | 200.485 | 1,09 % |
| 5 | 2016 | 202.319 | 0,91 % |

Sumber: BPS Kota Batu (diolah oleh penulis, 2019)

Jumlah penduduk merupakan variabel X_1 dengan data yang tertera pada tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Batu selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dalam tahunan. Kepadatan jumlah penduduk di Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal tersebut bisa terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batu dari tahun 2012 hingga 2016 rata-rata 1,09 % dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 1,14 % pada tahun 2012, 1,17 % pada tahun 2013, 1,17 % pada tahun 2014, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,09 % serta pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,91 %. Kenaikan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 0,91 %.

Laju pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan selalu mengalami perubahan karena faktor jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk. Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah penduduk Kota Batu pada Tahun 2012 hingga 2016 dengan unit bulanan sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1.

b. Produk Domestik Regional Bruto (X_2)

Tabel 6. PDRB Kota Batu Tahun 2012 – 2016

| No | Tahun | PDRB | |
|----|-------|-----------------|----------------|
| | | Rupiah (milyar) | Prosentase +/- |
| 1 | 2012 | Rp. 8.079.640 | 7,26 % |
| 2 | 2013 | Rp. 9.078.412 | 7,28 % |
| 3 | 2014 | Rp. 10.250.299 | 6,93 % |
| 4 | 2015 | Rp. 11.510.377 | 6,69% |
| 5 | 2016 | Rp. 12.901.976 | 6,61 % |

Sumber: BPS Kota Batu (diolah oleh penulis, 2019)

PDRB merupakan variabel X_2 dengan data yang tertera pada tabel . berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan PDRB di Kota Batu selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dalam tahunan. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah karena tujuan utama dari PDRB adalah untuk meringkas aktifitas ekonomi dalam suatu nilai uang selama periode tertentu pada suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu dari tahun 2012 hingga 2016 rata-rata 7,15 % dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 7,26 pada tahun 2012, 7,28 % pada tahun 2013, pada tahun 2014 mulai mengalami penurunan sebesar 6,93 % , pada tahun 2015 sebesar 6,69 % serta pada tahun 2016 semakin mengalami penurunan sebesar 6,61 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,28 % dan terendah pada tahun 2016 sebesar 6,61 %.

Besarnya PDRB dari tahun ketahun merupakan angka yang akan selalu mengalami fluktuasi. PDRB yang digunakan penelitian ini merupakan PDRB Kota Batu tahun 2012 hingga 2016 dengan unit bulanan sebagaimana yang telah dilampirkan pada lampiran 1.

c. Inflasi (X_3)

Tabel 7. Inflasi Kota Batu pada tahun 2012 – 2016

| No | Tahun | Inflasi | |
|----|-------|---------|----------------|
| | | % | Prosentase +/- |
| 1 | 2012 | 4,60 | - |
| 2 | 2013 | 7,92 | 41,91 % |
| 3 | 2014 | 8,14 | 2.70% |
| 4 | 2015 | 3,32 | -145,18% |
| 5 | 2016 | 2,62 | -26,71 % |

Sumber: BPS Kota Malang (diolah oleh penulis,2019)

Inflasi merupakan variabel X_3 dengan data yang tertera pada tabel . berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan inflasi di Kota Batu selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dalam tahunan. Inflasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat seberapa baik kebijakan moneter yang dijalankan. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus menerus dari satu periode ke periode lain. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentase kenaikan harga pada satu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.

Tingkat inflasi di Kota batu pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sebesar 41,91 %, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2,70 %, pada tahun 2015 penurunan yang drastis sebesar -145,18 %, dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -26,71 %. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 41,91 5 dan terendah pada tahun 2015 sebesar -145,18 %.

Besarnya tingkat inflasi dari tahun ke tahun akan selalu mengalami fluktuasi. Tingkat Inflasi yang digunakan penelitian ini merupakan data tingkat inflasi Kota Malang tahun 2012 hingga 2016 dengan unit bulanan sebagaimana

yang telah dilampirkan pada lampiran 1. Alasan inflasi Kota Batu menggunakan Inflasi Kota Malang, menurut hasil wawancara dari kepala bagian tata usaha BPS Kota batu dikarenakan Kota Batu belum mempunyai perdagangan modern, ekspor, dan impor.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari (a) uji normalitas, (b) uji multikolinieritas, (c) uji heterokodesitas, dan (d) uji autokorelasi. Berikut hasil dari uji asumsi kalsik yang telah dilakukan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan telah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Apabila nilai *sign.* > 0,05 maka data dikatakan terdistribusi normal dan jika nilai *sign.* < 0.05 maka data dikatakan tidak terdistribusi normal. Berikut tabel 6 yang merupakan hasil dari uji normalitas.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

| | | Unstandardize d Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .10594443 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .104 |
| | Positive | .091 |
| | Negative | -.104 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .802 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .541 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 7 tersebut diketahui bahwa nilai yang tertera pada *Asym.Sig. (1-tailed)* sebesar 0,541. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Sign*). Untuk variabel terikat penerimaan pajak daerah lebih besar (>) dari taraf nyata yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan pada variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homokedasitias atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Uji Heterokedasitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji glejser. Apabila nilai signifikansi antara variabel

independen dengan absolut residual lebih dari ($>$) 0,05 maka dikatakan tidak terjadi Heterokedastisitas dan jika kurang dari ($<$) 0,05 maka telat terjadi Heterokedastisitas (Priyatno, 2014). Berikut hasil uji yang telah dilakukan tertera pada tabel 8.

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -.188 | 3.910 | | -.048 | .962 |
| 1 Jml.Penduduk | 4.580 | 8.632 | .100 | .531 | .598 |
| PDRB | .604 | 3.486 | .033 | .173 | .863 |
| Inflasi | -.200 | .144 | -.187 | -1.389 | .170 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi jumlah penduduk sebesar 0,598, nilai signifikansi PDRB sebesar 0.863 dan nilai signifikansi inflasi sebesar 0,170. Angka tersebut menunjukkan bahwa signifikansi (*sig.*) untuk variabel independen lebih besar dari ($>$) 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi atau dengan kata lain variasi residual pada pengamatan ini bersifat homokedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji

multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF*. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan *VIF* kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji multikolonieritas tertera pada tabel 9.

Tabel 10. Uji Multikolonieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|----------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 Jml.Penduduk | .492 | 2.032 |
| PDRB | .480 | 2.084 |
| Inflasi | .965 | 1.037 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 9 tersebut diketahui bahwa nilai *tolerance* jumlah penduduk sebesar 0,492, nilai *tolerance* PDRB sebesar 0,480 dan nilai *tolerance* inflasi sebesar 0,965 sedangkan untuk nilai VIF jumlah penduduk sebesar 2,032, PDRB sebesar 2,084 dan inflasi sebesar 1,037. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* ketiga variabel lebih dari ($>$) 0,10 dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10. Hal tersebut menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian anggota observasi yang disusun menurut deret waktu (*data time series*). Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (*dw test*) dengan melakukan transformasi ke dalam bentuk *normalize* pada data sebelumnya. Apabila $du < dw < 4-du$, maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi tertera pada tabel 10.

Tabel 11. Hasil Uji autokorelasi dengan Durbin- Watson

| Durbin-Watson | dU | 4-dU |
|---------------|-------|-------|
| 1,735 | 1,689 | 2,311 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh peneliti, 2019)

Berdasarkan tabel 10 tersebut diketahui nilai Durbin-Watson (*dw*) sebesar 1,735, sedangkan untuk nilai *du* sebesar 1,689 dan 4 *du* sebesar 2,311. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *dw* hasil uji berada diantara nilai *du* dan 4-*du* atau $1,689 < 1,735 < 4-1,689$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan transformasi Ln pada data untuk melihat hubungan linier dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut penjelasan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tabel *model summary* nilai R merupakan korelasi berganda yang menjelaskan korelasi antara tiga variabel yaitu jumlah

penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah. Jika nilai mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah (Priyatno, 2014). Berikut tabel 10 hasil dari analisis regresi linier berganda.

Tabel 12. Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .855 ^a | .732 | .717 | 1.00516 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis,2019)

Diketahui nilai R pada korelasi variabel penelitian ini sebesar 0,855. Artinya korelasi antara variabel jumlah penduduk, PDRB, inflasi terhadap penerimaan pajak daerah memiliki hubungan yang erat karena nilai lebih mendekati 1. Adapun persamaan regresi linier berganda pada tabel 12 berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Persamaan Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -51.765 | 5.630 | | -9.194 | .000 |
| 1 Jml.Penduduk | 151.507 | 12.429 | 1.214 | 12.189 | .000 |
| PDRB | 43.082 | 5.020 | .865 | 8.583 | .000 |
| Inflasi | .029 | .208 | .010 | .139 | .890 |

Sumber: Uji SPSS (diolah oleh penulis,2019)

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : penerimaan pajak daerah

b_0 : *intercept*

b_1, b_2, b_3 : koefisien regresi

X_1 : jumlah penduduk

X_2 : PDRB

X_3 : inflasi

E : *error* / residu

Apabila memasukkan nilai hasil dari analisis regresi linier berganda, maka model matematis hubungan linier antarvariabel menjadi:

$$Y = -51,765 + 151,507 X_1 + 43,082 X_2 + 0,029 X_3 e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta adalah sebesar -51,765, hal ini menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari jumlah penduduk (X_1), PDRB (X_2), dan inflasi (X_3) maka nilai penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 51,765.
- b. Nilai koefisien regresi linier variabel jumlah penduduk (X_1) menunjukkan sebesar 151,507 menunjukkan setiap kenaikan nilai jumlah penduduk sebesar 1 maka akan mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 151,507. Sebaliknya apabila jumlah penduduk mengalami penurunan 1 maka akan berakibat pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 151,507.

- c. Nilai koefisien regresi linier variabel PDRB (X_2) adalah sebesar 43,082 menunjukkan apabila PDRB mengalami kenaikan 1 rupiah maka mengakibatkan kenaikan pada penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 43,082 rupiah.
- d. Nilai koefisien regresi linier inflasi (X_3) adalah sebesar 0,029 menunjukkan apabila inflasi mengalami kenaikan 1 persen maka mengakibatkan pada kenaikan penerimaan pajak daerah (Y) sebesar 0,029 persen.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini digunakan untuk membuktikan dari hipotesis yang telah dijelaskan oleh peneliti. Hasil hipotesis pada penelitian ini adalah koefisien detrmnasi (*Adjust R Square*), uji t (parsial), dan uji F (bersama-sama). Berdasarkan hipotesis pada bab II berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *software* SPSS 21:

a. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh yang diberikan oleh variabel jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak daerah. Analisis koefisien determinasi diketahui dari nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan pada tabel *model summary*, yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independel terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah sebesar 0,717 atau 71,7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa presentase sumbangan pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 71,7%, sedangkan

presentase sisanya sebesar 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/*independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen* (Ghozali, 2016). Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X_1), PDRB (X_2), dan inflasi (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak daerah (Y). Berikut *output coeficients* sebagai hasil uji statistik yang ditampilkan pada tabel 13.

Tabel 14. Uji Statistik T

| Model | t | Sig. |
|-------------------|--------|------|
| (Constant) | -9.194 | .000 |
| 1 Jml.Penduduk | 12.189 | .000 |
| PDRB | 8.583 | .000 |
| Inflasi | .139 | .890 |

Sumber: Uji SPSS (diolah olh penulis,2019)

Berdasarkan tabel 13, kesimpulan yang dapat diketahui, yaitu:

- 1) t hitung jumlah penduduk senilai 12.189 > t tabel senilai 2,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima, yang berarti jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara signifikan.
- 2) t hitung PDRB senilai 8.583 > t tabel senilai 2,003 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,050. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 diterima,

yang berarti PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara signifikan. Nilai t hitung yang positif menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif, yaitu jika PDRB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat.

- 3) t hitung inflasi senilai $0,139 < t$ tabel senilai $2,003$ dan nilai signifikansi $0,890 > 0,05$. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 ditolak, yang berarti inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

C. Pembahasan

Interpretasi hasil penelitian berikut akan menjelaskan pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu periode 2012 hingga 2016 yang sebelumnya telah diuji melalui uji statistik.

a. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik t yang tertera pada tabel 14, diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan t hitung $(12,189) > t$ tabel $(2,003)$ yang artinya variabel Jumlah penduduk (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila kenaikan variabel jumlah penduduk (X_1) sebesar 1 juta orang maka penerimaan pajak daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 12,189 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menjelaskan perubahan penerimaan pajak daerah di Kota Batu secara umum.

Sesuai dengan teori Makroekonomi Penduduk bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi yang selanjutnya menimbulkan penambahan produksi nasional dan meningkatnya ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Pohan (2014) juga menyatakan bahwa penduduk dan orang pribadi merupakan unsur yang selalu ada dalam pengertian dan fungsi pajak, karena penduduk dan orang pribadi dalam fungsi *budgetair* pajak merupakan subjek pajak yang memiliki pengaruh utama di dalam penerimaan pajak negara sebagai pemasukkan dana kas negara. Maka dari itu, sedikit banyaknya orang yang beromnibus atau tinggal di Kota Batu akan menentukan seberapa besar realisasi pungutan pajak daerah di Kota Batu tiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Halim (2002) yang menyatakan semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi akan menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, kesejahteraan ini tidak terlepas dari berbagai tingkat konsumsi yang menggambarkan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut pernyataan Norfridwitya (2011) bahwa besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat pula karena adanya penduduk yang produktif dalam perekonomian.

Hasil ini mendukung penelitian dari Asmuruf (2015) dan Saputra (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang sama, namun terdapat juga penelitian dengan hasil

yang berbeda salah satunya penelitian dari Fahmi (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perbedaan pengaruh tersebut bisa terjadi karena keadaan sosial geografis daerah bersangkutan berbeda. Kedua, faktor perbedaan tahun penelitian yang berbeda, hal ini turut mempengaruhi hasil uji statistiknya.

b. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik t yang tertera pada tabel 14, diketahui bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan t hitung $(8,583) > t$ tabel $(2,003)$ yang artinya variabel PDRB (X_2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila kenaikan variabel PDRB (X_2) sebesar 1 juta maka penerimaan pajak daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 8,583 juta.

Hasil penelitian ini sesuai teori Makroekonomi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, Dimana produk domestik bruto (PDB) adalah bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Syahputra (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui besaran pajak dan faktor penentu penerimaan pajak ditentukan oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro dan faktor internal seperti kebijakan dibidang perpajakan. Faktor eksternal berupa perkembangan ekonomi

makro tersebut berupa PDB di skala nasional jika di skala daerah berupa PDRB. Norfridwitya (2011) juga menjelaskan tentang PDRB perkapita riil yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan semakin meningkat juga. Lebih lanjut Pendapat Devas (1986) dalam bukunya Syahputra (2006) juga mengatakan bahwa upaya pengumpulan pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dibagi kemampuan membayar pajak, kemampuan membayar pajak secara keseluruhan dapat berasal dari meningkatnya pendapatan dan konsumsi dari presentase PDRB. BPS Kota Batu (2016) menyatakan bahwa salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB. Jika PDRB dalam suatu daerah mengalami peningkatan maka akan berdampak pada penerimaan perpajakan, khususnya pada penerimaan pajak daerah. Pada PDRB Kota Batu setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga hal tersebut berdampak pada kenaikan penerimaan pajak daerah Kota Batu (BPS Kota Batu, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nalendra (2014), Nastiti (2015), yang membuktikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang sama, namun terdapat juga penelitian dengan hasil yang berbeda antara lain penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf (2015) dan Saputra (2014) yang membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah bisa terjadi karena

adanya faktor perbedaan kondisi laju pertumbuhan ekonomi wilayah penelitian sebab disetiap keadaan laju pertumbuhan ekonominya berbeda dari wilayah satu ke wilayah lainnya, perbedaan tahun penelitian yang berbeda sehingga bisa mempengaruhi hasil uji statistiknya.

c. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik t yang tertera pada tabel 14, diketahui bahwa inflasi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan t hitung $(0,139) < t \text{ tabel } (2,003)$ yang artinya variabel tingkat inflasi (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila kenaikan variabel tingkat inflasi (X_2) sebesar 1 juta maka penerimaan pajak daerah (Y) belum tentu akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 juta. Hal ini disebabkan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi dan pajak bisa bersifat memaksa. Meskipun harga barang dan jasa naik karena inflasi namun masyarakat akan tetap membayar pajak sehingga tidak akan berakibat terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan BPS Kota Batu (2016) kota Batu merupakan kota wisata dengan objek wisata, hotel, restoran, parkir dan objek pajak lainnya yang melatar belakangi pertumbuhan ekonominya semakin meningkat sehingga dengan kemampuan konsumtif masyarakat yang berpenghasilan tinggi maka dengan adanya inflasi tidak akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah Kota Batu. Sedangkan berdasarkan teori Keynes dalam Putong (2013) mengemukakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar kemampuan ekonominya dan menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar

golongan masyarakat yang bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang. Tetapi Natsir (2014) menyatakan jika angka inflasi terus meningkat maka angka penjualan mereka akan merosot dan konsumen akan mengurangi belanja dan dapat menimbulkan produksi menurun, yang pada akhirnya penerimaan pajak suatu negara juga menurun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2014) yang membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi karena kemampuan ekonomi dan sifat konsumtif dari orang yang berpenghasilan tinggi tersebut masih tinggi. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih mampu menggunakan fasilitas-fasilitas atau obyek pajak daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Contohnya pergi ke hotel, hiburan, restoran dan objek pajak lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari uji statistik yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Pengaruh tersebut bersifat positif dan signifikan, artinya setiap kenaikan jumlah penduduk maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Asmuruf (2015) dan Saputra (2014).
2. Berdasarkan uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota batu. Pengaruh tersebut bersifat positif dan signifikan, artinya setiap kenaikan PDRB maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Nalendra (2014), Nastiti (2015), dan Norfridwtya (2011).
3. Berdasarkan uji statistik t yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota batu. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan Nastiti (2015) dan Saputa (2014)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk dan PDRB mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Batu. Jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak Kota Batu, maka pemerintah harus tetap menjaga dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi karena apabila pertumbuhan ekonomi menurun maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah Kota Batu.
2. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam serta menggunakan data dengan metode analisa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo
- Asmuruf, dkk. 2015. *Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong*. Diakses melalui ejournal.unsrat.ac.id pada 03 Februari 2017.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *PDRB Kota Batu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016*. Buku Publikasi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Batu Dalam Angka 2016*. Buku publikasi.
- Badan Pusat statistik. 2017. *Statistik Daerah Kota Batu 2017*. Buku Publikasi.
- Daramawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Fahmi, Rendra. 2015. *Analisis Jumlah Penduduk, PDRB, dan Balanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dikabupaten Jombang (Tahun 1998-2013)*. Skripsi. Diakses melalui unej.ac.id pada tanggal 25 Juli 2019
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofa Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik (desentralisasi fiscal dan pembangunan daerah)*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.

- Latumaerisa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesian Dan Dinamika ekonomi Global*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Lumpiyoadi, Rambat dan Ridho Bramulya Ikhsan. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengn Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nalendra,Encep H.R. 2014. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012)*. Diakses melalui elip.unikom.ac.id pada 03 Februari 2017.
- Nastiti,Chintia R. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak daerah (Studi kasus Pada “ Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Perpustakaan Universitas Brawijaya.
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neoloka, Amos. 2014. *Metode Penelitian Dan statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nopirin. 2012. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Norfridwitya, Muhammad K. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Pasuruan*. Diakses melalui digilibfeb.ub.ac.id pada 11 Oktober 2017.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, Chairil A. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diakses melalui luk.staff.ugm.ac.id pada 06 Oktober 2017

_____. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Diakses melalui kpu.go.id pada 06 Oktober 2017

_____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Bandung: Fokusmedia.

_____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah Dan retribusi Daerah*. Diakses melalui djpk.depkeu.go.id pada 06 April 2017.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Saputra, Andys D. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi. Perpustakaan Universitas Brawijaya.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Syahputra, Adi. 2006. *Perpajakan*. Diakses melalui repository.usu.ac.id pada 17 Oktober 2017.

Zulganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha ilmu.

INTERNET

<https://www.batukota.go.id>, diakses pada 22 Juli 2019 Pukul 15.39

<https://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/04/tiga-sektor-ini-jadi-andalan-kota-batu-dongkrak-perekonomian>, diakses pada 22 Juli jam 16.03

LAMPIRAN

Lampiran 1. Variabel X

| Tahun | Bulan | Jumlah Penduduk | Ln Jumlah penduduk | PDRB | Ln PDRB | Inflasi |
|-------|-------|-----------------|--------------------|----------|---------|---------|
| 2012 | Jan | 193657,2 | 12,174 | 639380,1 | 13,368 | 0,27 |
| | Feb | 193875,3 | 12,175 | 645214 | 13,377 | 0,18 |
| | Mar | 194089,9 | 12,176 | 651148,1 | 13,386 | 0,01 |
| | Apr | 194301,1 | 12,177 | 657182,4 | 13,396 | 0,27 |
| | Mei | 194508,8 | 12,178 | 663316,9 | 13,405 | 0,05 |
| | Jun | 194712,9 | 12,179 | 669551,5 | 13,414 | 0,54 |
| | Jul | 194913,6 | 12,180 | 675886,4 | 13,424 | 0,48 |
| | Agst | 195110,9 | 12,181 | 682321,4 | 13,433 | 1,04 |
| | Sept | 195304,6 | 12,182 | 688856,6 | 13,443 | 0,52 |
| | Okt | 195494,9 | 12,183 | 695491,9 | 13,452 | 0,22 |
| | Nov | 195681,7 | 12,184 | 702227,5 | 13,462 | 0,23 |
| | Des | 195865 | 12,185 | 709063,2 | 13,472 | 0,7 |
| 2013 | Jan | 196044,8 | 12,186 | 715999,2 | 13,481 | 0,94 |
| | Feb | 196221,2 | 12,187 | 723035,3 | 13,491 | 0,88 |
| | Mar | 196394,1 | 12,188 | 730171,6 | 13,501 | 0,93 |
| | Apr | 196563,5 | 12,189 | 737408 | 13,511 | -0,21 |
| | Mei | 196729,4 | 12,190 | 744744,7 | 13,521 | -0,35 |
| | Jun | 196891,8 | 12,190 | 752181,5 | 13,531 | 0,91 |
| | Jul | 197050,8 | 12,191 | 759718,5 | 13,541 | 3,49 |
| | Agst | 197206,3 | 12,192 | 767355,7 | 13,551 | 0,77 |
| | Sept | 197358,3 | 12,193 | 775093,1 | 13,561 | -0,57 |
| | Okt | 197506,8 | 12,194 | 782930,6 | 13,571 | 0,16 |
| | Nov | 197651,8 | 12,194 | 790868,4 | 13,581 | 0,23 |
| | Des | 197793,4 | 12,195 | 798906,3 | 13,591 | 0,53 |
| 2014 | Jan | 197812,1 | 12,195 | 808215,7 | 13,603 | 0,76 |
| | Feb | 197951,7 | 12,196 | 816404,9 | 13,613 | 0,31 |
| | Mar | 198092,9 | 12,196 | 824645 | 13,623 | 0,43 |
| | Apr | 198235,5 | 12,197 | 832936,2 | 13,633 | -0,13 |
| | Mei | 198379,7 | 12,198 | 841278,5 | 13,643 | 0,37 |
| | Jun | 198525,5 | 12,199 | 849671,8 | 13,653 | 0,31 |
| | Jul | 198672,7 | 12,199 | 858116,1 | 13,662 | 0,49 |
| | Agst | 198821,5 | 12,200 | 866611,5 | 13,672 | 0,47 |
| | Sept | 198971,8 | 12,201 | 875157,8 | 13,682 | 0,26 |
| | Okt | 199123,6 | 12,202 | 883755,3 | 13,692 | 0,4 |
| | Nov | 199277 | 12,202 | 892403,7 | 13,702 | 1,51 |
| | Des | 199431,9 | 12,203 | 901103,2 | 13,711 | 2,72 |
| 2015 | Jan | 199631,8 | 12,204 | 909256,1 | 13,720 | 0,04 |
| | Feb | 199787,9 | 12,205 | 918082,8 | 13,730 | -0,57 |
| | Mar | 199943,8 | 12,206 | 926985,5 | 13,740 | 0,34 |

| | | | | | | |
|------|------|----------|--------|----------|--------|-------|
| | Apr | 200099,3 | 12,207 | 935964,4 | 13,749 | 0,49 |
| | Mei | 200254,5 | 12,207 | 945019,4 | 13,759 | 0,45 |
| | Jun | 200409,4 | 12,208 | 954150,5 | 13,769 | 0,38 |
| | Jul | 200564,1 | 12,209 | 963357,7 | 13,778 | 0,57 |
| | Agst | 200718,4 | 12,210 | 972641 | 13,788 | 0,28 |
| | Sept | 200872,4 | 12,210 | 982000,5 | 13,797 | 0,21 |
| | Okt | 201026,1 | 12,211 | 991436 | 13,807 | 0,03 |
| | Nov | 201179,6 | 12,212 | 1000948 | 13,816 | 0,16 |
| | Des | 201332,7 | 12,213 | 1010535 | 13,826 | 0,89 |
| 2016 | Jan | 201485,5 | 12,213 | 1020199 | 13,836 | 0,58 |
| | Feb | 201638,1 | 12,214 | 1029939 | 13,845 | -0,15 |
| | Mar | 201790,3 | 12,215 | 1039755 | 13,854 | 0,02 |
| | Apr | 201942,2 | 12,216 | 1049648 | 13,864 | -0,4 |
| | Mei | 202093,9 | 12,216 | 1059616 | 13,873 | 0,15 |
| | Jun | 202245,2 | 12,217 | 1069660 | 13,883 | 0,63 |
| | Jul | 202396,3 | 12,218 | 1079781 | 13,892 | 0,78 |
| | Agst | 202547 | 12,219 | 1089978 | 13,902 | -0,03 |
| | Sept | 202697,5 | 12,219 | 1100250 | 13,911 | 0,17 |
| | Okt | 202847,6 | 12,220 | 1110599 | 13,920 | -0,2 |
| | Nov | 202997,4 | 12,221 | 1121024 | 13,930 | 0,45 |
| | Des | 203147 | 12,222 | 1131526 | 13,939 | 0,58 |

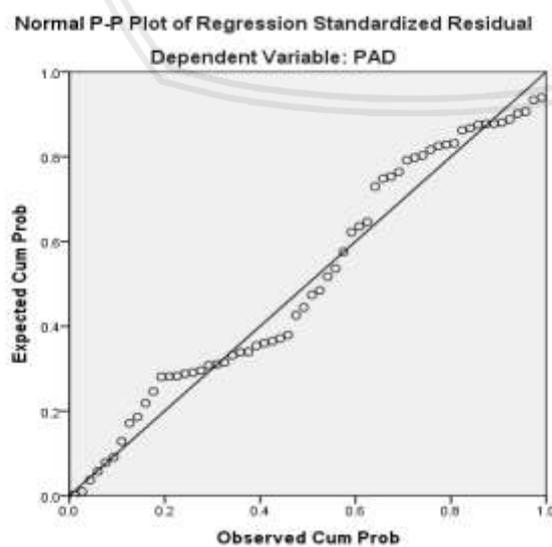


Lampiran 2. Variabel Y

| Tahun | Bulan | Penerimaan Pajak Daerah | Ln Penerimaan Pajak Daerah |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 2012 | Jan | 1743851979 | 21,279 |
| | Feb | 1851393344 | 21,339 |
| | Mar | 1959679740 | 21,396 |
| | Apr | 2068711167 | 21,450 |
| | Mei | 2178487625 | 21,502 |
| | Jun | 2289009114 | 21,551 |
| | Jul | 2400275634 | 21,599 |
| | Agst | 2512287185 | 21,644 |
| | Sept | 2625043767 | 21,688 |
| | Okt | 2738545381 | 21,731 |
| | Nov | 2852792025 | 21,772 |
| | Des | 2967783701 | 21,811 |
| 2013 | Jan | 3083520407 | 21,849 |
| | Feb | 3200002145 | 21,886 |
| | Mar | 3317228914 | 21,922 |
| | Apr | 3435200714 | 21,957 |
| | Mei | 3553917545 | 21,991 |
| | Jun | 3673379407 | 22,024 |
| | Jul | 3793586300 | 22,057 |
| | Agst | 3914538224 | 22,088 |
| | Sept | 4036235179 | 22,119 |
| | Okt | 4158677166 | 22,148 |
| | Nov | 4281864183 | 22,178 |
| | Des | 4405796232 | 22,206 |
| 2014 | Jan | 4507793841 | 22,229 |
| | Feb | 4634167538 | 22,257 |
| | Mar | 4762237852 | 22,284 |
| | Apr | 4892004784 | 22,311 |
| | Mei | 5023468332 | 22,337 |
| | Jun | 5156628498 | 22,364 |
| | Jul | 5291485281 | 22,389 |
| | Agst | 5428038681 | 22,415 |
| | Sept | 5566288699 | 22,440 |
| | Okt | 5706235334 | 22,465 |
| | Nov | 5847878586 | 22,489 |
| | Des | 5991218455 | 22,514 |
| 2015 | Jan | 6394895139 | 22,579 |
| | Feb | 6530776206 | 22,600 |

| | | | |
|------|------|------------|--------|
| | Mar | 6657501855 | 22,619 |
| | Apr | 6775072084 | 22,637 |
| | Mei | 6883486895 | 22,652 |
| | Jun | 6982746286 | 22,667 |
| | Jul | 7072850258 | 22,680 |
| | Agst | 7153798812 | 22,691 |
| | Sept | 7225591946 | 22,701 |
| | Okt | 7288229661 | 22,710 |
| | Nov | 7341711957 | 22,717 |
| | Des | 7386038835 | 22,723 |
| 2016 | Jan | 7421210293 | 22,728 |
| | Feb | 7447226332 | 22,731 |
| | Mar | 7464086952 | 22,733 |
| | Apr | 7471792154 | 22,734 |
| | Mei | 7470341936 | 22,734 |
| | Jun | 7459736299 | 22,733 |
| | Jul | 7439975243 | 22,730 |
| | Agst | 7411058768 | 22,726 |
| | Sept | 7372986874 | 22,721 |
| | Okt | 7325759561 | 22,715 |
| | Nov | 7269376829 | 22,707 |
| | Des | 7203838678 | 22,698 |

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas Grafik *Normal Probability plot*



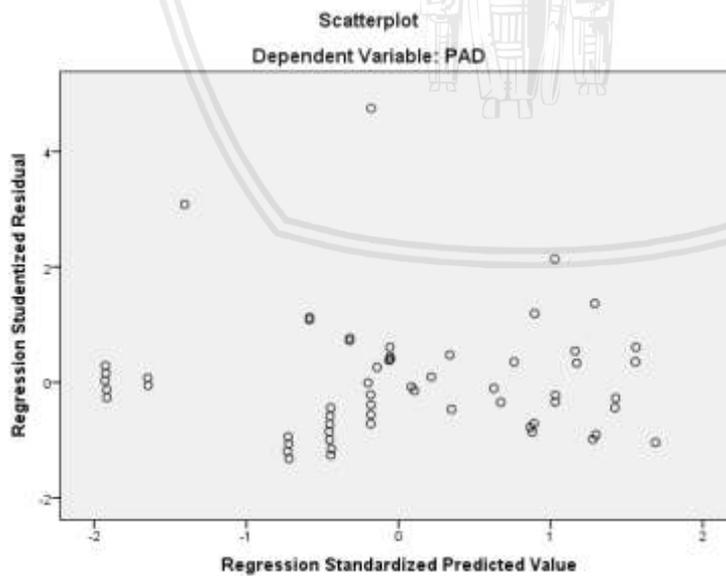
Lampiran 4. Hasil Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .10594443 |
| | Absolute | .104 |
| Most Extreme Differences | Positive | .091 |
| | Negative | -.104 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .802 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .541 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 5. Hasil Uji Heterokedastisitas



Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -.188 | 3.910 | | -.048 | .962 |
| Jml.Penduduk | 4.580 | 8.632 | .100 | .531 | .598 |
| PDRB | .604 | 3.486 | .033 | .173 | .863 |
| Inflasi | -.200 | .144 | -.187 | -1.389 | .170 |

a. Dependent Variable: Abs.res

Lampiran 7. Hasil Uji Multikoliniertas

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Jml.Penduduk | .492 | 2.032 |
| | PDRB | .480 | 2.084 |
| | Inflasi | .965 | 1.037 |

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Lampiran 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .855 ^a | .732 | .717 | 1.00516 | 1.735 |

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jml.Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | -51.765 | 5.630 | | -9.194 | .000 |
| | Jml.Penduduk | 151.507 | 12.429 | 1.214 | 12.189 | .000 |
| | PDRB | 43.082 | 5.020 | .865 | 8.583 | .000 |
| | Inflasi | .029 | .208 | .010 | .139 | .890 |

Lampiran 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .855 ^a | .732 | .717 | 1.00516 | 1.735 |

Lampiran 11. Hasil Statistik T

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -51.765 | 5.630 | | -9.194 | .000 |
| 1 Jml.Penduduk | 151.507 | 12.429 | 1.214 | 12.189 | .000 |
| PDRB | 43.082 | 5.020 | .865 | 8.583 | .000 |
| Inflasi | .029 | .208 | .010 | .139 | .890 |